

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingginya angka urbanisasi dan angka kelahiran di Jakarta membuat daerah perkotaan semakin padat (Alfian & Akbar, 2020). Permasalahan tentang pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi pada daerah perkotaan tentunya bukan hal baru. Jakarta merupakan kota yang padat penduduk dan mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Perubahan signifikan terhadap pusat kota yang menjadi pusat dari kegiatan ekonomi membuat banyaknya lapangan tenaga kerja. Walaupun perkembangan ekonomi di daerah perkotaan meningkat masih banyak permasalahan mengenai perekonomian (Sari & Ridlo, 2021).

Kepadatan penduduk di perkotaan dapat menimbulkan dampak mengenai permukiman. Permukiman merupakan bagian dari permukaan bumi yang dihuni oleh manusia yang meliputi infrastruktur dan fasilitas pendukung kehidupan penduduk yang membentuk satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Permukiman kumuh menjadi masalah hampir setiap kota di Indonesia, bahkan di kota di negara berkembang lainnya. Karena, kapasitas ruang yang ada tidak mampu menampung jumlah penduduk sehingga menimbulkan *Slum Area* (Aliyati, 2011).

Menurut (UU RI No 4 Tahun 1992, 2014) permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, tingginya tingkat kepadatan bangunan dalam ruang yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan, dan penghuni nya.

Permukiman kumuh seringkali dicirikan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, kualitas perumahan yang buruk, dan terbatasnya layanan dan fasilitas penting (Rahmawati et al., 2020). Pendapatan mereka yang rendah memaksa

mereka untuk tetap tinggal di kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Permukiman kumuh ialah permukiman perkotaan yang tersusun dari lingkungan padat yang tumbuh secara spontan di pusat kota atau di pinggiran kota. Permukiman kumuh terjadi di tanah ilegal tanpa kepemilikan yang jelas (Supriatna & Van Der Molen, 2014).

Kelurahan Manggarai merupakan salah satu kawasan di wilayah Jakarta yang dianggap sebagai permukiman kumuh. Permintaan dan kebutuhan permukiman yang tinggi di Kelurahan Manggarai tidak didukung oleh ketersediaan lahan. Masyarakat mencari pilihan lain untuk memenuhinya dengan membangun permukiman di kawasan non-perumahan seperti bantaran sungai, rel kereta api dan kawasan lainnya. Pada wilayah ini pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan keterbatasan ruang dan sumber daya, sehingga permukiman menjadi padat dan sulit diatur (Apriliani et al., 2022).

Penelitian ini untuk mengetahui karakteristik permukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Manggarai secara lebih spesifik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait tempat tinggal yang layak.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada masalah “Karakteristik permukiman kumuh di 14 wilayah RT yang ada di RW 04 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan”.

1.3 Identifikasi Masalah

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Salah satu wilayah yang memiliki permukiman kumuh cukup tinggi adalah Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tahun 2022, persentase kawasan kumuh di Kelurahan Manggarai mencapai 25%. Salah satu RW di Kelurahan Manggarai yang memiliki permukiman kumuh cukup tinggi adalah RW 04.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana karakteristik permukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Manggarai?"

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi mengenai pemukiman yang layak untuk ditempati dan untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan untuk menciptakan tempat tinggal yang nyaman.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai gambaran dalam menciptakan solusi untuk menangani permasalahan permukiman kumuh.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang berminat pada permasalahan permukiman kumuh.